

Membaca Ulang Konsep Pembangunan Politik Dan Modernisasi Politik *Rereading The Concept of Political Development and Political Modernization*

Muhammad Ilham¹, Nita Aribah Hanif²

Ilmu Pemerintahan, Universitas Pamulang, Banten, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Vol. 1, No. 01
Hal : 52-61
Diterbitkan : 01 Juli 2025

A b s t r a k

Kajian ini membahas tiga tema penting yang mendasari konsep utama dalam studi ilmu politik, yakni modernisasi politik, pembangunan politik, dan demokrasi. Dalam berbagai literatur ilmu politik, ketiga tema ini selalu mendapat porsi bahasan penting dari para ahli ilmu politik untuk menganalisis isu budaya politik, watak kekuasaan, proses pelembagaan politik, partai politik, birokrasi, institusi demokrasi (parlemen) atau institusi peradilan serta tema-tema yang lebih kontemporer semisal dinamika pemilu, kelompok kepentingan atau kelompok penekan, perilaku pemilih, atau peran politik media massa. Kajian kini menggunakan pendekatan kualitatif, metode analisis deskriptif berbasis data studi pustaka. Studi ini berkesimpulan, bahwa rasionalitas politik, kapasitas sistem, dan kesiapan transformasi budaya politik warga tidak cukup efektif menjadi prasyarat modernisasi dan pembangunan politik, tanpa dibarengi kesadaran, pengetahuan, kemampuan adaptasi, dan akseptabilitas elite politik dan warga negara dalam menerima berbagai bentuk perubahan sebagai konsekuensi modernisasi politik. Perangkat demokrasi lokal juga akan sulit bekerja efektif jika modernisasi politik gagal dalam mengadaptasi kearifan lokal dan budaya politik ‘gaya Asia’ yang masih eksis dari bangsa bersangkutan.

Kata Kunci : Modernisasi politik, pembangunan politik, demokrasi.

KORESPONDENSI

No Handphone :
0858-8049-7254
E-mail : ilhamm6137@gmail.com

A b s t r a c t

This paper discusses three important themes underlying the mainconcepts in the study of political science, namely political modernisation, political development and democracy. In various political science literatures, these three themes always receive an important postion of discussion from political science experts to analyse issues of political culture, the nature of power, the process of political institutionalization, political parties, bureaucracy, democratic institutions (parliament) or judicial institutions as well as more contemporary themes such as electoral dynamics, interest groups, voter behaviour, or the polotical role of the mass media. The current study uses a qualitative approach, descriptive analysis method based on literature study data. This study concludes that political rationality, system capacity, and readiness to transform citizens political culture are not effective enough as prerequisites for political modernization and development, without awareness, knowledge, adaptability, and acceptability of political elites and citizen in accepting various forms of change as a consequence of political modernization. Local democratic tools will also be difficult to work effectively if political modernization fails to adapt the local wisdom and 'Asian Style' political culture in the nation concerned.

Keywords: Political Modernization, Political Development, Democracy

Latar Belakang

Dalam studi ilmu politik, terutama untuk memahami dinamika dan karakter sistem politik di negara-negara sedang berkembang (NSB), para ahli ilmu politik kerap menggunakan konsep modernisasi politik dan pembangunan politik secara bergantian (jika bukan secara bersamaan) untuk menjelaskan tentang pentingnya proses rasionalisasi, transformasi, institusionalisasi, dan modernisasi politik sebagai prasyarat penting dalam pengelolaan sistem demokrasi dan kekuasaan yang logis, rasional, dan akuntabel.

Konsep modernisasi politik juga kerap digunakan sebagai acuan konseptual untuk melihat sejarah dinamis perjalanan politik negara berbasis bangsa. Rintinya, modernisasi politik juga mengacu pada fokus kajian tentang sukses tidaknya kontinum dari proses transformasi struktural dalam kehidupan politik dan masyarakat suatu bangsa. Dalam pengertian ini, modernisasi politik adalah sebuah proses yang bersifat dinamis; sebuah aktivitas kontinyu pengondisionan formasi pergeseran struktural dari jenis pemerintah tradisional ke sistem pemerintahan modern (*shifts from traditional government to modern government*)¹.

Namun demikian, konsep modernisasi politik dan pembangunan politik kerap dimaknai secara berbeda oleh para ahli. Beberapa ahli politik menggunakannya sebagai program untuk melakukan reformasi institusi politik dan demokrasi. Ahli yang lain coba merealisir konsep tersebut secara langsung dengan debat tata kelola (governance) yang melampaui fokus kajian politik yang bersifat normatif dan lokalistik. Sementara ahli lain juga berasumsi bahwa modernisasi politik dan pembangunan politik adalah bagian dari konsep utama modernisasi politik. Tujuannya, untuk memahami transformasi struktural dalam kaitannya dengan praktik politik di negara-negara demokrasi, khususnya di NSB, menyangkut trasformasi aspek otoritas politik, identitas nasional, kesetaraan, keadilan, dan kepemimpinan. Singkatnya memahami secara dinamis-mutualis interaksi antara institusi politik dengan pertumbuhan ekonomi dan kaitannya dengan nilai-nilai budaya serta aspek lain dari kehidupan sosial politik yang ada suatu negara².

Modernisasi politik dan pembangunan politik, secara umum juga dimaknai sebagai acuan untuk memahami bagaimana perubahan budaya politik dan transformasi institusi politik dapat berlangsung efektif, sebagai dampak dari berlangsungnya proses modernisasi politik di banyak negara di dunia pasca Perang Dunia ke-2 (PD 2). Tujuan perubahan institusi politik dan budaya politik mengarah pada percepatan dan integrasi sistem politik ke dalam proses modernisasi politik, di mana standar kinerja dan pencapaian dapat diperoleh oleh masyarakat yang kurang berkembang. Seperti halnya perkembangan politik, sangat sulit untuk memberikan definisi yang tepat tentang modernisasi politik.

Modernisasi politik adalah proses yang dilatari oleh kemampuan pemanfaatan sumberdaya negara secara rasional dengan maksud Istilah masyarakat modern merujuk pada struktur masyarakat yang dicirikan oleh penerapan teknologi, kesaling- tergantungan sosial yang luas, urbanisasi, literasi, mobilitas sosial, dan faktor dinamis lainnya. Dalam konteks masyarakat Barat, modernisasi telah menghasilkan marjinalisasi politik masyarakat tradisional di satu sisi, serta kebangkitan masyarakat modern pada sisi lain, yakni sebuah masyarakat yang mendasarkan dirinya pada ilmu pengetahuan, logika hi-tech, relasi sosial kompetitif, tata kelola pemerintahan yang rasional, fokus pada keadilan dan kesetaraan, konsen pada hak-hak publik, dan kosmologi hidup yang individual, liberal, dan sekuler membentuk tatanan masyarakat (politik) modern.

Penulisan ini bersifat repetitif, yakni mencoba mengkaji ulang konsepsi modernisasi politik, dan pembangunan politik sebagai tema Pembangunan Politik dan Modernisasi. Tujuan penulisan ini adalah me-refresh kembali gagasan-gagasan utama dari konsep modernisasi politik, dan pembangunan politik yang tetap update dalam realitas kehidupan politik modern saat ini.

Metode Penelitian

Secara metodologis, penulisan jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena studi ini fokus pada review tiga konsep utama kajian: modernisasi politik, pembangunan politik, dan demokrasi, melalui analisis deskriptif berbasis studi pustaka. Penggunaan metode deskriptif ditujukan untuk menyajikan gambaran obyek penelitian secara sistematis terkait data, fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki³, untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tanpa membuat kesimpulan secara lebih luas⁴, namun melalui suatu penelusuran data pemahaman atas fakta-fakta empirik dengan interpretasi yang tepat⁵. Teknik pengumpulan data dalam studi ini bersifat dokumentatif melalui empat tahap konstruksi data berikut:

- 1) Pengumpulan dan identifikasi data;
- 2) Kategorisasi, klasifikasi, dan komparasi data;
- 3) Interpretasi dan analisis; dan
- 4) Penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Modernisasi Politik

Secara historis, modernisasi politik merupakan proses perubahan terhadap sistem politik (termasuk sistem sosial dan budaya) yang berkembang di Eropa Barat dan Amerika Utara sejak abad ke-17 hingga abad ke-19. Gagasan modernisasi kemudian menyebar ke berbagai belahan

negara Eropa lainnya. Proyek modernisasi politik juga diimpor ke negara-negara dunia ketiga (atau negara pascakolonial meminjam istilah Hamza Alavi) pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, seperti di negara-negara kawasan Amerika Selatan serta negara-negara di wilayah Asia dan Afrika.

Secara historis, konsepsi modernisasi berkembang dalam tiga fase. Fase pertama antara 1950-an dan 1960-an, fase kedua tahun 1970-an dan 1980-an, dan fase ketiga tahun 1990-an. Kelahiran teori modernisasi setidaknya dilatar oleh tiga peristiwa penting dunia, yakni:

- 1) penataan kehidupan negara pasca PD ke-2;
- 2) munculnya Amerika Serikat sebagai kekuatan hegemon dunia (super power); dan
- 3) perluasan gerakan komunis yang dipelopori Uni Soviet.

Menurut Suwarsono dan So, ada pengaruh teori sosial yang melatar lahirnya teori modernisasi, yaitu teori evolusi dan teori fungsionalisme.⁶ Pertama, teori evolusi yang menggambarkan proses evolusi masyarakat dalam dua hal: (a) asumsi bahwa perubahan sosial merupakan gerakan satu arah, seperti garis lurus (bersifat linear). Masyarakat adalah sebuah organisme yang berkembang, dari masyarakat primitif menuju masyarakat maju; (b) asumsi subjektif teori evolusi tentang nilai dan tujuan akhir perubahan sosial, yakni perubahan (dari ciri masyarakat tradisional menuju tatanan) masyarakat modern sebagai sesuatu yang niscaya dan tak mungkin dihindari.

Secara konseptual, teori modernisasi politik yang dikembangkan oleh para ilmuwan sosial dan politik Barat—dimana beberapa gagasan dasarnya dirintis dari teori modernisasi ekonomi yang dikembangkan oleh W.W. Rostow (dalam *The Stages of Economic Growth A Non-Communist Manifesto*, 1960), juga Alex Inkeles dan David H. Smith (dalam *Becoming Modern; Individual Change in Six Development Countries*, 1974)—yang memokuskan kajiannya pada bagaimana proyek modernisasi dilakukan melalui proses perubahan mental, transformasi sosial-budaya, dan transisi politik di NSB yang sistem sosial, politik, dan (mental) budayanya dianggap masih ‘tradisional’ atau ‘terkebelakang’.

Tujuan transformasi budaya, perubahan mental masyarakat, dan transisi politik di NSB dirancang secara sistematis dan programatis untuk disuntikkan sebagai vitamin baru bagi perluasan proyek liberalisasi sosial, liberalisasi politik, dan liberalisasi budaya melalui pengadopsian logika dan cara berpikir modernitas seperti yang berlangsung dalam struktur sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat Barat Barat. Strategi yang di injeksi berupa serangkaian program, seperti resformasi kelembagaan sosial, revitalisasi dan reorganisasi struktur politik, adopsi model pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur politik, termasuk rekayasa dalam kehidupan sosial dan budaya⁷.

Sementara tujuan dari proyek globalisasi atau mondialisasi gagasan modernisasi politik adalah agar negara di berbagai belahan dunia dapat segera mengintegrasikan dirinya ke dalam tahap kehidupan politik, ekonomi, dan sosial-budaya masyarakat modern (Barat) yang berciri industrial, rasional, efisien, dan kompetitif. Gagasan modernisasi politik meyakini bahwa hal utama yang mesti segera dilakukan untuk memodernisasi kehidupan politik masyarakat adalah dengan merubah cara pandang (mindset) yang tradisional (melalui rekayasa mental, perubahan orientasi dan nilai-nilai sosial, integrasi sistem dan struktur ekonomi serta transformasi budaya) menuju cara pandang modern menurut ukuran masyarakat Barat yang rasional.

Bisa kita katakan, pasca PD ke- 2, dominasi intelektual negara-negara kapitalis Barat atas kepentingannya di NSB/negara pascakolonial, tidak hanya fokus pada isu bisnis internasional, impor murah bahan mentah, membuka pasar-pasar baru, namun mereka juga meyakini bahwa

asistensi pembangunan, support finansial dan teknologi secara masif akan menjadi panacea bagi mentransformasi masyarakat agraris yang berciri subsisten menjadi masyarakat industri modern. Para pemikir Barat pendukung utama teori ini, antara lain Walt Rostow, Samuel Huntington, Bert Hoselitz, Alex Inkeles, Roy Harrod, Evsey Domar, David McClelland, dan beberapa teoritis modernisasi lainnya.

Dalam studi pembangunan politik, term perubahan politik dan modernisasi politik merupakan dua isu atau variabel penting yang akan menentukan sukses tidaknya upaya pembangunan politik yang dilakukan sebuah bangsa—terutama di NSB atau di negara pascakolonial dalam menata ulang sistem politiknya. Perubahan atau modernisasi politik merupakan elemen dasar pembentukan konsep pembangunan politik, bukan sebaliknya. Memahami pembangunan politik berarti mengkaji tentang arti ‘pembangunan’ sekaligus menelisik arti ‘politik’ dan relasinya dengan pembangunan/modernisasi.¹⁰

Sebagai bidang kajian penting dalam ilmu politik, konseptualisasi ‘pembangunan politik’ (*political development*) memiliki arti yang berbeda dengan ‘politik pembangunan’ (*politics of development*). Jika politik pembangunan (*politics of development*) berurusan dengan isu perencanaan, pembuatan kebijakan, strategi atau implementasi program tertentu yang dibuat pemerintah untuk melaksanakan pembangunan di bidang politik, maka pembangunan politik (*political development*) mengandung makna lebih luas: menyangkut segala aktivitas atau kegiatan yang dilakukan pemerintah atau negara untuk mengubah suatu tatanan atau kondisi politik tertentu secara mendasar menuju ke suatu tatanan/kondisi politik yang lebih rasional, sistemik, dan fungsional. Pasalnya, setiap sistem politik akan berupaya maksimal untuk mewujudkan tahap kehidupan politik masyarakat dan bangsa ke arah tatanan kepolitikan modern—yang efektif, rasional, fungsional, adaptif, terlembaga, dan integratif—and secara

eksternal dapat terhubung secara sinergis dengan lingkungan politik yang ada di luar (domestik maupun internasional).¹¹

Secara lebih rinci, Barber menempatkan¹² politik pembangunan (political of development) sebagai: (1) rancangan kehidupan bernegara yang ditentukan oleh konteks politik melalui struktur, kebijakan, dan operasinya; (2) kebijakan yang berdimensi sangat luas, mencakup sistem, struktur, dan kebijakan pemerintahan/negara; (3) kewajiban politik pemerintah dalam memberi dorongan, motif, dan kesempatan bagi individu untuk secara aktif terlibat dalam konteks, baik secara kognitif maupun secara perilaku; (4) keteraturan yang sistematis dari keterlibatan perilaku warga negara (seperti partisipasi pemilu dalam sistem demokrasi), dimana setiap individu terprogram efektif melibatkan diri secara intens dalam politik untuk membangun identitas nasionalnya; dan (5) nilai-nilai yang didukung dan ditetapkan oleh sistem politik, struktur politik, dan aktor politik, seperti kemampuan kontrol atau regulasi yang mampu memberi akses, kesempatan, kebebasan, kesetaraan hak, penentuan nasib sendiri, dan bentuk-bentuk ekspresi politik warga negara lainnya.

Secara derivatif, pembangunan politik merupakan aspek dan konsekuensi politik dari proses perubahan yang menyeluruh, meliputi modernisasi yang membawa implikasi atau konsekuensi pada pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, peningkatan pendidikan, media massa, perubahan status sosial, dan aspek-aspek lainnya. Secara teologis, pembangunan politik berarti proses perubahan menuju pada satu atau beberapa tujuan dari sistem politik. Telos atau tujuan tersebut meliputi stabilitas politik, integrasi politik, demokrasi, partisipasi, mobilisasi, dan sebagainya. Sementara secara fungsional, pembangunan politik adalah suatu gerakan perubahan menuju sistem politik ideal yang dikembangkan oleh suatu negara menuju sistem politik yang berciri demokratis.

Fase-fase pembangunan politik sebagai salah satu upaya negara yang ingin mengintegrasikan dirinya ke tahap modernisasi untuk menghindari implikasi-evolutif yang tidak sesuai dengan perubahan yang bersifat kompleks dan akseleratif, perubahan, seperti: (1) tantangan modernisasi dari masyarakat tradisional; (2) konsolidasi kepemimpinan modern yang belum tentu sejalan dengan gaya dan pola kepemimpinan tradisional; (3) transformasi ekonomi dan masyarakat pedesaan berkultur agraris (desa) ke model industri (kota); dan (4) tantangan integrasi masyarakat agraris yang berstruktur sederhana ke masyarakat modern yang berstruktur kompleks.

Di sisi lain, proses rediscovery yang berlangsung dalam sistem sosial yang berciri struktural-fungsional tersebut, menurut Apter, akan memberi benefit berupa hadirnya masyarakat rasional-fungsional sebagai penopang utama demokrasi. Bagi Apter, etika dan sikap

ilmiah (sebagai basis dari cara berpikir rasional dan empiris) adalah “spirit yang mendasari sebuah ideologi untuk mendorong bentuk identitas dan solidaritas sosial baru di tengah perubahan”. Etika ilmiah didasari oleh kebutuhan pertukaran bebas antara pengetahuan, informasi, dan ragam kepentingan dalam tatanan masyarakat yang tengah menjalani proses modernisasi—dengan dukungan para teknolog dan ilmuwan sosial yang berperan sebagai mesin penggerak modernisasi.

Dalam literatur ilmu politik, tentu cukup banyak variasi konsep atau definisi pembangunan politik yang dirilis oleh para ahli ilmu politik. Situasi ini menyebabkan terjadinya kesulitan konseptual dalam merumuskan definisi tunggal yang relatif sederhana; yang mencakup seluruh aspek dari fenomena pembangunan politik. Para ilmuwan politik terkemuka Indonesia, seperti Prof. Juwono Sudarsono, Prof.

Mochtar Mas'oed, Prof. Yahya Muhammin, Prof. Afan Gaffar, Prof. Ramlan Surbakti, dan beberapa lainnya yang banyak menelaah isu-isu pembangunan politik, dalam pembahasannya secara garis besar telah berupaya merangkum sejumlah definisi dan konseptualisasi pembangunan politik yang digagas oleh Lucian W. Pye, seorang ilmuwan politik Amerika, yang pemikirannya tentang political development banyak dirujuk oleh para ahli ilmu sosial Indonesia.

Dalam kerangka ruang lingkup (scope of political development), pembangunan politik juga memiliki lingkup pengertian yang sangat luas, yang antara lain meliputi: (1) pembangunan sistem politik; (2) pembangunan ideologi politik; (3) pembangunan komunikasi politik; (4) pembangunan sistem pemilu (5) pembangunan partisipasi politik masyarakat; (6) pembangunan pers/media massa; (7) pembangunan aparatur administrasi pemerintahan sebagai penyelenggara politik negara; (8) pembangunan identitas bangsa (nasionalisme politik), dan (9) pembangunan manajemen politik.

Untuk memahami kerangka konseptual terpenting dari beragam cebaran definisi pembangunan politik yang ada, ada baiknya kita melihat sekilas ragam konsep political development. Setidaknya konsepsi pembangunan politik terpenting terdapat dalam dua karakter.

Pertama, semangat persamaan (generalisasi), dimana dalam definisi/konsepsi pembangunan politik selalu kita temukan semangat untuk menyertakan warga negara yang berperan aktif dalam proses kehidupan politik. Generalisasi adalah prinsip universal, dapat diterapkan di semua kondisi atau proses politik yang bersifat impersonal. Generalisasi juga berarti terbukanya kesempatan bagi setiap warga negara dalam menentukan proses rekrutmen jabatan-jabatan politik dan publik dengan menggunakan standar-standar yang rasional dan obyektif, dan bukan standar yang bersifat koruptif, kolutif, dan nepotik.

Kedua, terkait dengan kapasitas sistem politik, karena kapasitas sistem berkaitan dengan kemampuan sistem politik (political system capability) dalam membuat kebijakan sebagai output dalam proses politik. Kapasitas juga berarti kondisi yang memengaruhi performa proses penyelenggaraan pemerintahan, efektivitas dan efisiensi dalam penerapan kebijakan publik, dan kapasitas yang berkaitan dengan rasionalitas dalam proses administrasi dan orientasi kebijakan, baik yang bersifat populis maupun elitis.

Alhasil, dari deskripsi konseptual di atas, pembangunan politik setidaknya dapat dirumuskan sebagai sebuah proses yang bersifat linear, yang dimulai dari pendekatan ekonomi pembangunan sebagai pondasi awal (atau prasyarat) menuju terciptanya stabilitas politik (political integration/political cohesiveness). Artinya, upaya menciptakan stabilitas dan pencapaian prestasi ekonomi (kesejahteraan hidup masyarakat) adalah dua kata kunci yang menjadi ambisi terbesar kajian pembangunan politik. Sejauh mana jalannya pembangunan politik dalam mengantarkan stabilitas politik dan kesejahteraan negara, tentu akan sangat tergantung dari dua tujuan utama tersebut. Jika dalam praktiknya terjadi inkonsistensi di antara keduanya, maka proses pembangunan politik yang diinisiasi langsung oleh (para elite) negara hanya akan menghasilkan instabilitas politik, konflik sosial, dan berbagai bentuk tindak kekerasan massa, bahkan revolusi politik.

Jika secara konseptual kita sederhanakan, maka Organski melihat pembangunan politik sebagai efektivitas dan efisiensi pemerintah dalam memobilisasi masyarakat dan sumberdaya materil negara untuk mencapai tujuan akhir nasional: (1) melakukan integrasi nasional; (2) mewujudkan industrialisasi; (3) meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat secara nasional; dan (4) memasuki era kelimpahan. Berikutnya,

C.E Blank lebih menitikberatkan pembangunan politik pada fase-fase berikut: (1) terpenuhinya prasyarat modernisasi; (2) konsolidasi kepemimpinan dan manajemen modern (sekaligus mereduksi kepemimpinan tradisional); (3) transformasi ekonomi dan masyarakat dari yang berciri agraris/pedesaan menuju masyarakat berciri perkotaan/industri; dan integrasi masyarakat.

Kesimpulan

Dari pembahasan terkait konsep dan isu modernisasi politik, dan pembangunan politik seperti telah dipaparkan, dapat disimpulkan beberapa pokok pemikiran berikut. Pertama, secara konseptual modernisasi politik dan pembangunan adalah bagian proyek demokratisasi global. Modernisasi politik adalah konsep bias Barat yang banyak digunakan untuk menganalisis sebagai cara pandang atau perspektif untuk mengubah mind set (sistem, struktur, kultur, dan kebijakan) politik masyarakat dari cara pandang politik tradisional menuju masyarakat dengan cara pandang politik yang rasional-modern.

Kedua, masalah utama yang kerap muncul dari proses modernisasi politik adalah: (a) kesiapan sistem politik dalam mengadaptasi berbagai proses perubahan (baik internal maupun eksternal) yang berlangsung dalam proses modernisasi politik; (b) hadirnya prasyarat, seperti rasionalisasi kekuasaan, pergantian sejumlah besar pejabat-pejabat politik tradisional (yang legitimasinya berbasis etnis, keagamaan, dan kekeluargaan) oleh otoritas kekuasaan nasional yang legitimasinya berbasis rasionalitas dan sekuler.

Ketiga, proyek modernisasi politik akan selalu membawa dampak ikutan, seperti: (a) ketegangan dan konflik, karena proses modernisasi politik di satu sisi mensyaratkan adanya perubahan kelembagaan sistem politik secara dramatis; memastikan sistem politik baru bisa menjaga stabilitas, kohesifitas, dan integrasi dalam dinamika kehidupan sistem politik; dan (b) ketegangan dan konflik merupakan sesuatu inheren dalam proses modernisasi politik, antara lain dicirikan oleh tuntutan persamaan hak-hak politik bagi setiap warga negara, berlangsungnya proses spesialisasi politik dan diferensiasi sosial secara intens, serta peningkatan kapasitas sistem politik untuk mengakomodir ragam tuntutan, kepentingan, dan aspirasi masyarakat yang berkembang kian rumit dan kompleks.

Keempat, pembangunan politik merupakan proses politik yang kompleks, yang melibatkan diferensiasi, spesialisasi, dan integrasi. Pembangunan politik juga ditandai oleh tingkat partisipasi politik masyarakat, melalui kontrol/pengawasan masyarakat terhadap pemerintah/penguasa; dimana warga negara secara langsung terlibat dalam memengaruhi kebijakan pemerintahan. Dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi, pembangunan politik adalah: (a) prasyarat penting bagi pembangunan ekonomi; (b) sebagai ciri khas kehidupan politik masyarakat industri; (c) sebagai bentuk modernisasi politik; (d) sebagai mekanisme operasi negara bangsa yang rasional; (e) sebagai pola penataan pembangunan administrasi dan hukum; (f) sebagai mekanisme dalam mobilisasi dan mendorong partisipasi massa; (g) sebagai sarana efektif dalam pembinaan demokrasi; (h) sebagai instrumen dalam menata stabilitas dan perubahan yang teratur; (i) sebagai manajemen untuk mobilisasi dan memonopoli kekuasaan nasional; dan (j) sebagai satu segi proses perubahan sosial yang bersifat multidimensional.

Daftar Pustaka

- Apter, David E. 1965. *The politics of modernization*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Armer, J. Michael, & Katsillis, John. 1992. "Modernization Theory", in Borgatta, Edgar, & Borgatta, Marie L. (eds.). *Encyclopedia of Sociology*, 3 (pp. 1299–1304). New York: Macmillan.
- Barber, Brian K. 2014. The politics of development. *Human Development*, 57(6), 319-321.
- Budiman, Arief. 1995. *Teori pembangunan dunia ketiga*. Jakarta: PT. Gramedia.

- Hasan, Nazmul. 2021. Political modernization in the developing countries: Challenges and prospects. Asian Journal of Social Sciences and Legal Studies, 3(3), 41-48.
<https://doi.org/10.34104/ajssls.02.1.041048>. Diakses pada 30 Desember 2024.
- Nazir, M. 1988. Metode penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rustow, Dankwart A. 1968. Modernization and comparative politics: Prospects in research and theory. Comparative Politics, 1(1), 37-51.
<https://doi.org/10.2307/421374>. Diakses pada 30 Desember 2024.
- Sugiyono. 2005. Memahami penelitian kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, Ramlan. 1999. Memahami ilmu politik. Cetakan Keempat. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Suwarsono, & So, Alvin Y. 2006. Perubahan sosial dan pembangunan di Indonesia: Teori-teori modernisasi, dependensi dan sistem dunia. Jakarta: LP3ES.
- Whitney, Frederick Lamson. 1960. The element of research. New York: Prentice-Hall, Inc.